

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ateng Syafrudin dan Surpin Na'a. 2010. *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: Penerbit PT. Alumni.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dadang Solihin, et. all. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dahlan Thaib. 2000. *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*. Yogyakarta: Liberty.
- Erry Nurdianzah. 2020. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Jawa (Kajian Historis Pendidikan Islam Dalam Dakwah Walisanga)*. Semarang: Universitas Wahid Hasyim.
- Euis Shariasih. 2017. *Citra Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Arsip*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- J.R. Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie. 1997. *Agenda Pembangunan Hukum di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- , 1998. *Reposisi Tiga Cabang Kekuasaan Negara Otonomi Daerah dan Parlemen di Daerah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- , 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Bhuana Ilmu Persada.
- Koentjaraningrat. 2000. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- , 2001. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Lukman Santoso Az. 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ni'matul Huda. 2009. *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- S. Nasution. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Siswanto Sunarno. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharizal dan Muslim Chaniago. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Sulasman dan Gumilar Setia. 2013. *Teori-Teori Kebudayaan dari Teori hingga Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sulistyo Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Yosef Riwu Kaho. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

### **C. Jurnal/ Artikel**

Alfarid, Adam, Chindy Trivendi Junior dan Putri Rahmadani, 2022, "*Implikasi Penetapan Adat Basandi Syarak- Syarak Basandi Kitabullah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Sumatera Barat Terhadap Politik Hukum Pemerintah Daerah Sumatera Barat*", Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 3, Nomor 10.

Kamal Firdaus, 2007, "*Hukum Adat: Suatu Kebanggaan yang Perlu Dipertanyakan Lagi*", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 7, Nomor 6.

Laode Monto Bauto, 2014, "*Perspektif Agama dan Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)*", Jurnal: JPIS, Kendari: FISIP Universitas Haluoleo, Volume 23, Nomor 2.

### **D. Website**

Arrazzi Fakhruddin, *Undang-Undang Sumatera Barat dinilai Diskriminasi Budaya Mentawai, ini Kata Kesbangpol*, <https://padangkita.com/Undang-Undang-sumbar-dinilai-diskriminasi-budaya-mentawai-ini-kata-kesbangpol/>.

Chandra Riki, *Soal Polemik Undang-Undang Provinsi Sumbar, Feri Amsari: Karakteristik Mentawai Tidak Terlihat Jelas*, <https://sumbar.suara.com/read/2022/07/19/183937/soal-polemik-Undang-Undang-provinsisumbar-feri-amsari-karakteristik-mentawai-tidak-terlihat-jelas>.

CNN Indonesia. *Polemik Wajib Jilbab Padang, Perda Intoleran Didesak Dicabut*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128063022-20-599326/polemik-wajib-jilbab-padang-perda-intoleran-didesak-dicabut>.

- DPR RI. 2016. *Pembentukan Daerah Kabupaten Mentawai*, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/450>.
- Gloria Setyvani Putri. 2022. *Jika Undang-Undang No.17/2022 Tidak Direvisi atau Dibatalkan, Masyarakat Mentawai Nyatakan Keluar dari Sumbar*, <https://amp.kompas.com/regional/read/2022/08/05/144812078/jika-uu-17-2022-tidak-direvisi-atau-dibatalkan-masyarakat-mentawai-nyatakan>.
- Kemendagri. 2018. *Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Indonesia s/d Tahun 2014*, <https://web.archive.org/web/20190712121648/http://otda.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Pembentukan-Daerah-Daerah-Otonom-di-Indonesia-s.d-Tahun-2014-2.pdf>.
- Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, *Sekilas tentang Kabupaten Kepulauan Mentawai*, <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/1556/sekilas-tentang-kabupaten-kepulauan-mentawai.html>.
- Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. *Sekilas tentang Kabupaten Kepulauan Mentawai*, <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/1556/sekilas-tentang-kabupaten-kepulauan-mentawai.html>.
- LIVE : Advokat Sumbar Bicara - *UU Sumbar Akui Syariat Islam: Plus atau Minus?* – YouTube.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. <http://www.mentawaikab.go.id/main>.
- Rus Akbar Saleleubaja dan Ocha Mariadi. 2022. *Usulan Sumbar Menjadi DIM, Ini Kata Sejumlah Tokoh dari Mentawai*, <https://www.mentawaikita.com/baca/5216/usulan-sumbar->.
- Rusdi Chaprian. 2015. *Asal Usul Sumatera Barat-Sejarah Minangkabau*, Dokblog, DPR RI, Jakarta, [https://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F\\_20150326\\_5101.pdf](https://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150326_5101.pdf).
- Sastra Yola, *Warga Adat Mentawai Minta Gubernur Perjuangkan Mentawai dalam Undang-Undang Sumbar*, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/08/09/gubernur-sumbar->

[diminta-ikut-perjuangkan-masyarakat-adat-mentawai-dalam-Undang-Undang-sumbar.](#)



Teguh Gunung Anggun. 2022. *Falsafah Budaya Minang Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah*, <https://sumbarprov.go.id/home/news/9282-falsafah-budaya-minang-adat-basandi-sarak-sarak-basandi-kitabullah>.

Ulhusna Asma. *Suku Tradisional Mentawai, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat*, <https://www.kompasiana.com/husnaasmaul/60fe338106310e5bc16a5ab3/suku-tradisionalmentawai-kabupaten-kepulauan-mentawai-Sumatera-barat>.

